



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Liwa, 1 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis, 6 (Enam) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Subkegiatan dengan realisasi fisik rata-rata 100% dan keuangan 98.18%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Sosial Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| KATA PENGANTAR..... | : | <i>i-i</i> |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | : | <i>i-ii</i> |
| DAFTAR ISI..... | : | <i>i-iii</i> |
| DAFTAR TABEL..... | : | <i>i-iv</i> |
| DAFTAR GRAFIK..... | : | <i>i-v</i> |
| DAFTAR GAMBAR..... | : | <i>i-vi</i> |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | : | <i>I-1</i> |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | : | <i>II-1</i> |
| BAB III. KAPASITAS ORGANISASI..... | : | <i>III-1</i> |
| BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA..... | : | <i>IV-1</i> |
| BAB V. PENUTUP..... | : | <i>V-1</i> |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---------|
| TABEL 2.1 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat..... | : II-3 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... | : II-8 |
| Tabel 2.3 Pagu Program kegiatan Subkegiatan Tahun 2023..... | : II-9 |
| Tabel 2.4 Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2023..... | : II-11 |
| Tabel 2.5 Target Kinerja Tingkat Program Tahun 2023..... | : II-12 |
| Tabel. 3.1 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan..... | : III-1 |
| Tabel. 3.2 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | : III-1 |
| Tabel . 3.3 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjurangan..... | : III-2 |
| Tabel.3.4 Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)..... | : III-3 |
| Tabel 3.5 Pagu DPA Dinas Sosial tahun 2022 dan 2023..... | : III-4 |
| Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... | : IV-2 |
| Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... | : IV-5 |
| Tabel 4.3 Capaian Kinerja Tahun 2022..... | : IV-5 |
| Tabel 4.4 Capaian Kinerja Tahun 2023..... | : IV-6 |
| Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja SPM tahun 2023..... | : IV-8 |
| Tabel 4.6 Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung tahun 2023..... | : IV-9 |
| Tabel 4.7 Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan tahun 2023..... | : IV-10 |
| Tabel 4.8 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023..... | : IV-12 |
| Tabel 4.9 Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023.. | : IV-17 |
| Tabel 4.10 Rekap Kunjungan Masyarakat..... | : IV-19 |

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Grafik Flowchart Rehabilitasi Sosial tahun 2023 : IV-4

Grafik 2 Realiasi anggaran tahun 2023 : IV-16

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANSASI..... : 1-6



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan



sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membuat Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai uraian tugas yaitu:



- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sosial;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- d. melaksanakan tugas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok usaha bersama baik sosial maupun ekonomi;
- h. meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial bagi organisasi kepemudaan dan pekerjaan sosial masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan lembaga pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- j. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial dan yayasan sosial;

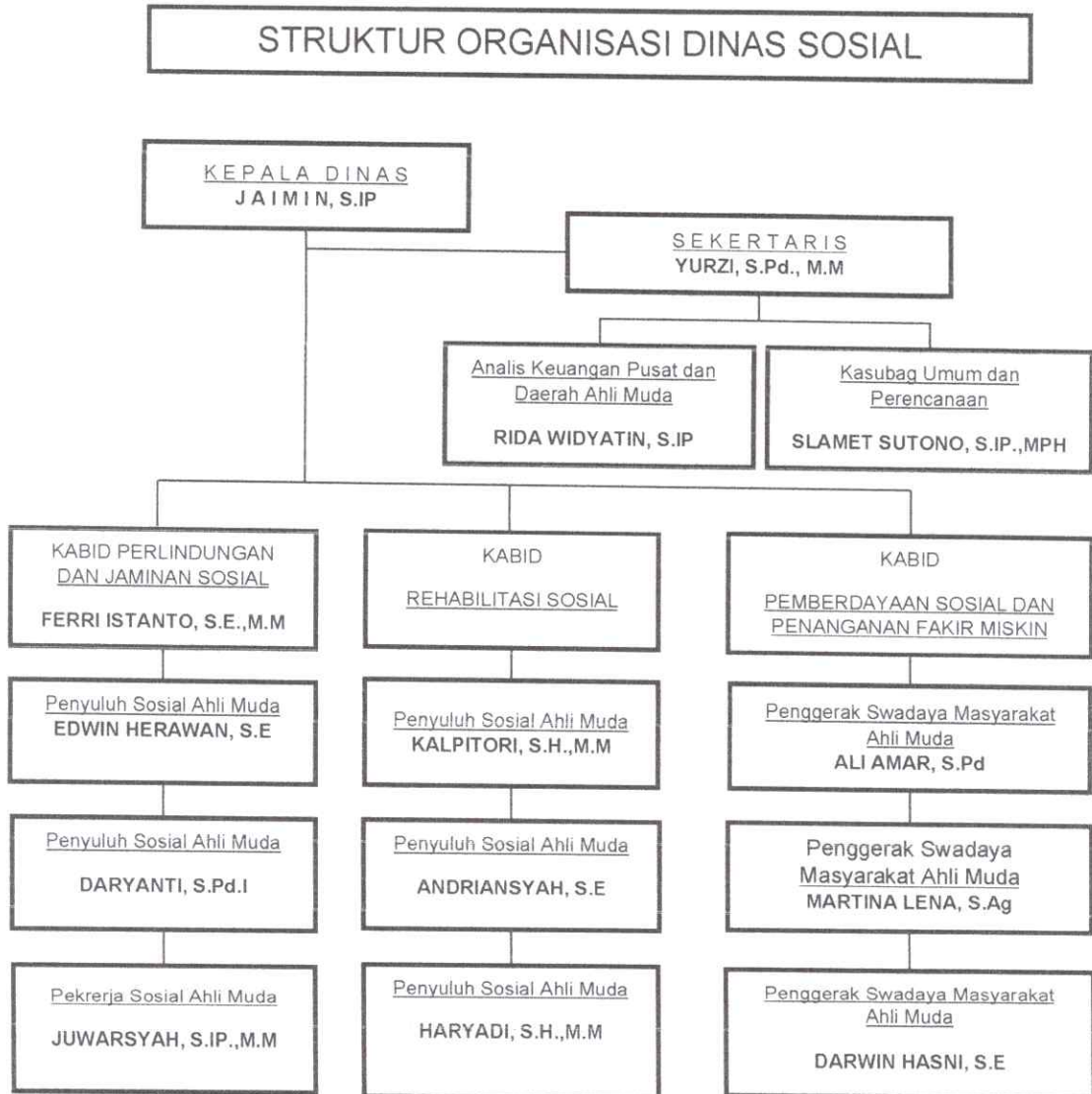


- k. melaksanakan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategis penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Dinas sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



C. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Peran Strategis Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan



yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;
Indikatornya Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti



4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
Indikatornya Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Indikatornya Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*), maka isu strategis yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut: **“Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS dan pencapaian SPM bidang Sosial”**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BPNT), peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permendagri No 59 Tahun 2021, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Pendamping PKH, PSKS, LKS, PSM, TAGANA.
3. Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan aset dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460/44/III.16/KPTS/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang secara rinci tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|--|--------------------------------|--|---|
| Meningkatnya PMKS Mandiri | Meningkatnya PMKS yang Berdaya | Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif | Penerapan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, mencakup bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga. |
| | | Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi PMKS | Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS |
| | | | peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif. |
| | | Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal | Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal |
| | | Meningkatkan modal sosial dan peran kelembagaan sosial | pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong |
| pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial | | | |



Strategi peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga.

Pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS dan peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program merupakan penjabaran kebijaksanaan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu. Program dapat bersifat jangka panjang (5 tahunan), menengah (3 tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa



Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat antara Lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Rehabilitasi Sosial

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

3. Program Penanganan Bencana

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan | Target (%) | | | |
|----|--------------------------------|--|---|------------|-------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang Berdaya | Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | 83,91 | 87,82 | 91,73 | 95,64 |
| 5 | | | | | | | |

Pada tahun 2024 Dinas Sosial kabupaten Lampung Barat mengusulkan Anggaran Perubahan sehingga mengubah Pagu DPA Murni yang semula Rp 4.610.224.900,- bertambah menjadi Rp 4.825.138.126, walaupun bertambah pagu akan tetapi **tidak** merubah Perjanjian Kinerja di Tingkat Kepala OPD. Berikut rincian pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2024

Tabel 2.3
Pagu Program dan kegiatan Tahun 2024

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU APBD 2024 | APBD Pergeseran 2024 | APBD Perubahan |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SOSIAL | 4.610.224.900 | 4.610.224.900 | 4.825.138.126 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.083.279.600 | 3.083.279.600 | 2.514.881.923 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.495.000 | 36.495.000 | 36.495.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.519.783.700 | 2.519.783.700 | 2.612.753.926 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.161.000 | 13.161.000 | 13.161.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 211.439.500 | 211.439.500 | 224.414.500 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.902.800 | 123.902.800 | 123.902.800 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144.222.600 | 144.222.600 | 144.222.600 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.305.563.5500 | 1.305.563.5500 | 1.358.126.500 |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 199.095.000 | 199.095.000 | 251.658.000 |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 1.106.468.500 | 1.106.468.500 | 1.106.468.500 |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 129.440.000 | 129.440.000 | 164.845.000 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 129.440.000 | 129.440.000 | 164.845.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 92.941.800 | 92.941.800 | 113.941.800 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 92.941.800 | 92.941.800 | 113.941.800 |



C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2023 – 2026 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial berikut disampaikan Target Kinerja tersebut:

1. Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2024

Tabel 2.4
Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2024

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan | Target (%) | | | |
|----|--------------------------------|--|---|------------|-------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang Berdaya | Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | 83,91 | 87,82 | 91,73 | 95,64 |
| 5 | | | | | | | |



2. Target Kinerja Tingkat Program

Tabel 2.5
Target Kinerja Tingkat Program Tahun 2024

| No | Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 78.75% |
| 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi | 19,55% |
| | | Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 13,23% |
| | | IKM | B |
| 3 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima | 100% |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase komponen utama taman makam pahlawan | 78.57% |



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat seluruhnya berjumlah 36 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil berjumlah 26 orang dan Tenaga Lepas Sukarela (THLS) berjumlah 10 orang.

Tabel. 3.1
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No | Pangkat/Gol | Jumlah |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Pembina Tk I. / IV.c | 1 Orang |
| 2. | Pembina Tk I. / IV.b | 1 Orang |
| 3. | Pembina / IV.a | 6 Orang |
| 4. | Penata TK I / III.d | 9 Orang |
| 5. | Penata / III.c | 1 Orang |
| 6. | Penata Muda TK I / III.b | 3 Orang |
| 7. | Penata Muda / III.a | 2 Orang |
| 8. | Pengatur TK I / II.d | 1 Orang |
| 9. | Golongan IX | 2 Orang |
| | Jumlah | 26 Orang |

Tabel. 3.2
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Strata Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|----------|
| 1 | S-2 | 9 Orang |
| 2 | S-1 | 15 Orang |
| 3 | SLTA | 2 Orang |
| | Jumlah | 26 Orang |



Tabel . 3.3
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjenjangan

| No | Jenis Diklat Penjenjangan | Jumlah |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | Diklat PIM II / Spamem | 1 Orang |
| 2 | Diklat PIM III / Spama | 2 Orang |
| 3 | Diklat PIM IV/ Adum | 10 Orang |
| | Jumlah | 12 rang |

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial adalah Dinas baru yang merupakan pemecahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perlengkapan yang dimiliki antara lain:

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan):

Tabel.3.4

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|-------------------------|----------|
| 1 | Meja 1 Biro | 6 Buah |
| 2 | Gedung Kantor | 1 Unit |
| 3 | Gedung Loka Bina Karya | 1 Unit |
| 4 | Taman Makam Pahlawan | 1 Unit |
| 5 | Kendaraan Roda 4 | 4 Unit |
| 6 | Kendaraan Roda 6 (truk) | 2 Unit |
| 7 | Kendaraan Roda 2 | 30 Unit |
| 8 | Mesin Potong Rumput | 4 unit |
| 9 | Meja 1/2 Biro | 58 Buah |
| 10 | Filling Kabinet | 10 Buah |
| 11 | Kursi Putar | 7 Buah |
| 12 | Kursi Lipat | 47 Buah |
| 13 | Kursi Plastik | 100 Buah |
| 14 | Rak Arsip | 5 Buah |
| 15 | Kotak Sampah | 10 Buah |



| | | |
|----|--------------------------|--------|
| 16 | Meja Panjang | 1 Buah |
| 17 | Laptop | 7 Buah |
| 18 | Komputer | 4 Buah |
| 19 | Kursi Tamu | 1 Set |
| 20 | Meja Tamu | 3 Buah |
| 21 | Photo Dewan | 1 Buah |
| 22 | Mesin Tik | 1 Buah |
| 23 | Sound system | 1 Buah |
| 24 | Microphone | 2 Buah |
| 25 | Internet | 3 Buah |
| 26 | Lemari | 1 Buah |
| 27 | Printer | 7 Buah |
| 28 | Dispenser | 1 Buah |
| 29 | Brangkas | 1 Buah |
| 30 | Lemari Besi | 1 Buah |
| 31 | Rak Buku | 1 Buah |
| 32 | Jam Dinding | 1 Buah |
| 33 | Lambang Garuda Pancasila | 1 Buah |
| 34 | Photo Presiden | 1 Buah |
| 35 | Photo Wakil Presiden | 1 Buah |
| 36 | Genset | 1 buah |
| 37 | Photo Gubernur | 1 Buah |
| 38 | Photo Wakil Gubernur | 1 Buah |
| 39 | Pas Bunga | 1 Buah |

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat mengalami tiga kali Penetapan Pagu DPA yaitu DPA Murni, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan. Berikut disampaikan pagu DPA tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.5
Pagu DPA Dinas Sosial tahun 2023 dan 2024

| No | Pagu 2023 | Murni 2024 | Pergeseran 2024 | Perubahan 2024 |
|----|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 4.663.727.640 | 4.610.224.900 | 4.610.224.900 | 4.825.138.126 |

Berdasarkan tabel diatas terjadi penurunan anggaran dari tahun 2023 ke 2024 dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah,



Selanjutnya terjadi kenaikan anggaran dari pagu APBD Murni ke APBD Perubahan. penambahan anggaran diperuntukkan untuk tunjangan kinerja pegawai PPPK sebanyak 2 orang, Assesment pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum dan kekerasan seksualitas, Assesment bantuan kemensos untuk disabilitas, lansia dan bantuan anak-anak, Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah, Penambahan Buffer Stock Bencana, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 460/44/III.16/KPTS/2022 tanggal 24 April 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | % | 87,82 | 91,22 | 103,81 |
| | | 5 | | | | |

Penentuan capaian indicator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dengan formulasi perhitungan dari jumlah 5 (lima) indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi target pelayanan. Untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

| No | Indikator | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|----|--|------------|------------|-----------|
| | | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 244 orang | 260 orang | 100% |
| 2 | Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 9 orang | 21 orang | 100% |



| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 3 | Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 49 orang | 241 orang | 100% |
| 4 | Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 2 orang | 1 orang | 100% |
| 5 | Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | 400 orang | 320 orang | 100% |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dapat terrealisasi seluruhnya 100% dari target yang ditentukan.

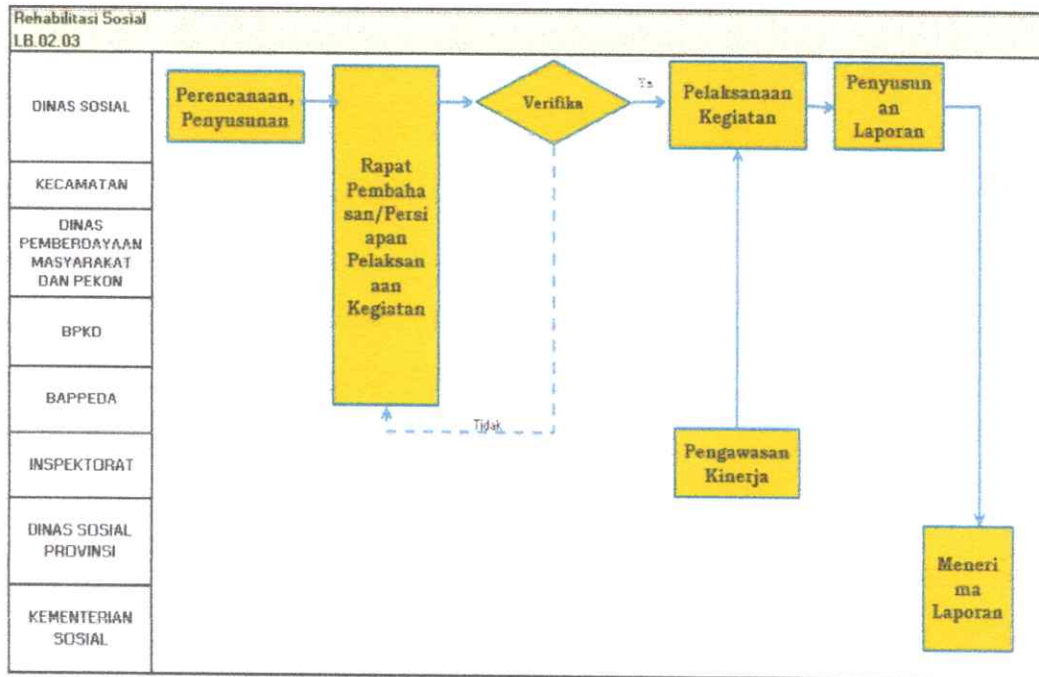
Untuk melihat gambaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan operasionalnya, diperlukan peta proses bisnis yang tersusun secara terstruktur. Penyusunan dilaksanakan dengan tujuan agar Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal, memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan.

Berikut ini gambaran peta proses bisnis pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait dengan Program Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:



Grafik 1

Grafik *Flowchart* Rehabilitasi Sosial tahun 2024



B. Perbandingan Kinerja

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan, untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Jenis PMKS dan Formulasi Pengukuran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---|------------|--------|-----------|-----------|
| | | | Tahun 2024 | | | |
| 1 | Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | % | 87,82 | 91,22 | 103,87 |
| | | | Tahun 2023 | | | |
| 2 | | 5 | % | 83,91 | 87,34 | 104,09 |

Tahun 2023 Dinas Sosial sudah beralih ke Renstra Dinas Sosial 2023-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026. sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Berdaya dengan indikator Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya dengan 5 (lima) jenis PMKS menggunakan formulasi pengukuran yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar



pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya sesuai dengan target nasional, terkait dengan target tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM tersebut sesuai target yang diterapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja | Target Nasional | Realisasi Kabupaten | Keterangan |
|----|--|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti | 100 % | 36,69% | 129/ 129 X 100% |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti | 100 % | 100% | 21/21 X 100% |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti | 100 % | 100% | 241/241 X 100% |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti | 100 % | 100% | 1/1 X 100% |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja | Target Nasional | Realisasi Kabupaten | Keterangan |
|----|--|--|-----------------|---------------------|----------------|
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kab/kota | 100 % | 100% | 320/320 X 100% |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua target indikator kinerja SPM tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target Nasional, realisasi Lampung Barat sama-sama tercapai 100%. Hal ini berarti penanganan 5 unsur pembentuk indikator sasaran PMKS telah tertangani sesuai target kinerja, baik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atau secara nasional. Meski disadari, dibalik angka-angka yang menjadi target ini, masih ada banyak angka penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan melalui penanganan dan pencegahan. Pelayanan SPM bidang sosial merupakan pelayanan yang bersifat lintas sektoral sehingga tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial saja, tetapi perlu dukungan dan kerja sama dengan OPD, Stake holder terkait, keluarga dan masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan bersinergi dengan kabupaten/kota lain, provinsi maupun kementerian sosial.

2. Perbandingan Kinerja dengan Target dan atau capaian kinerja tingkat Provinsi Lampung

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang sama-sama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk urusan sosial, namun terdapat perbedaan yang jelas untuk capaian kinerja masing-masing. Lingkup Dinas Sosial Kabupaten



kota/kabupaten sebatas diluar panti, sedangkan Dinas Sosial Provinsi cakupannya penanganan didalam panti. Untuk melihat capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut.:

Tabel 4.6
Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan
Provinsi Lampung tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kabupaten Lampung Barat | | Provinsi Lampung | |
|----|---|-------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (dalam panti)* | 100% | 100% | 100% | 98,91% |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (dalam Panti)* | 100% | 100% | 100% | 99,33% |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti (dalam panti)* | 100% | 100% | 100% | 99,33% |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (dalam panti)* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota (dalam panti)* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Total | 100% | 100% | 100% | 99,51% |

Ket: * (dalam panti) kewenangan Provinsi

Kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung mengacu pada SPM Provinsi namun lingkupnya dalam panti, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi menunjukkan hasil yang baik dari target yang sudah ditentukan. Secara keseluruhan, total capaian kinerja Lampung Barat memang lebih unggul dari capaian Provinsi Lampung. Meski begitu, hal tersebut didasari pada cakupan area pertanggungjawaban yang berbeda. Pemerintah Provinsi Lampung jelas mencakupi area 15 kabupaten/ kota. Maka perolehan capaian kinerja merupakan akumulasi dari 15 kab/ kota tersebut.



3. Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di Wilayah Provinsi Lampung dalam upaya pengukuran kinerja dengan kabupaten lain, untuk hal ini sebagai evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat menyandingkan dengan Kabupaten Way Kanan, data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Realisasi Kabupaten | |
|----|--|--------|---------------------|------------|
| | | | Lampung Barat | Way Kanan* |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar diluar panti | 100% | 100% | 84,44% |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | 100% | 96,67% |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 100% | 100% | 74,99% |
| | Total | | 100% | 91,02% |

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan 2024

Pencapaian kinerja masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia sudah ditentukan targetnya oleh Kementerian Sosial sebesar 100%, hal tersebut berdasarkan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk realisasinya menyesuaikan dengan jumlah PMKS dari masing-masing kabupaten yang akan ditangani. Selain itu anggaran biaya yang



tersedia dalam penanganan PMKS sangat berpengaruh pada capaian kinerja kabupaten masing-masing.

Pada Kabupaten Lampung Barat, area pertanggungjawaban pengelolaan penyandang masalah kesejahteraan hanya mencakupi wilayah teritorial Kabupaten Lampung Barat saja. Secara geografis, wilayah Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan Kabupaten Lampung Way Kanan. Meski sebagian wilayahnya sama, yaitu perbukitan, namun dominasinya berbeda. Way Kanan di dominasi oleh dataran, sementara Lampung Barat didominasi oleh Perbukitan. Belum lagi disertai oleh berbagai faktor seperti kondisi alam, lingkungan dan cuaca yang berbeda di Lampung Barat jika dibandingkan dengan kab/ kota lainnya di Provinsi Lampung. Namun hal tersebut dapat ditangani sehingga capaian kinerja Lampung Barat dapat mencapai 100%.

**C. Realisasi Anggaran Tahun 2024**Tabel 4.8
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | % |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1.06.01.5 | BELANJA DAERAH | 4.825.138.126 | 4.670.029.133 | 155.108.993 | 96,79 |
| 1.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.782.298.126 | 4.627.189.133 | 155.108.993 | 96,76 |
| 1.06.01.5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.614.038.926 | 2.486.267.632 | 127.771.294 | 95,11 |
| 1.06.01.5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.028.259.200 | 2.000.921.501 | 27.337.699 | 98,65 |
| 1.06.01.5.1.05 | Belanja Hibah | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| 1.06.01.5.2 | BELANJA MODAL | 42.840.000 | 42.840.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.5.2.02 | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.340.000 | 11.340.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 3.188.224.826 | 3.047.338.414 | 140.886.412 | 95,58 |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.495.000 | 36.466.500 | 28.500 | 99,92 |
| 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 4.993.500 | 6.500 | 99,87 |
| 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.385.000 | 4.378.500 | 6.500 | 99,85 |
| 1.06.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.775.000 | 7.770.500 | 4.500 | 99,94 |
| 1.06.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.430.000 | 5.424.500 | 5.500 | 99,90 |
| 1.06.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.445.000 | 5.442.000 | 3.000 | 0,00 |
| 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.460.000 | 3.459.500 | 500 | 0,00 |
| 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | 4.998.000 | 2.000 | 99,96 |
| 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.612.753.926 | 2.484.982.632 | 127.771.294 | 95,11 |



| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.604.798.926 | 2.477.027.632 | 127.771.294 | 95,09 |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.02.07 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2.455.000 | 2.455.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 10.275.000 | 10.270.000 | 5.000 | 99,95 |
| 1.06.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10.275.000 | 10.270.000 | 5.000 | 99,95 |
| 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.161.000 | 13.161.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 13.161.000 | 13.161.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 224.414.500 | 224.353.501 | 60.999 | 99,97 |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 6.730.500 | 6.730.500 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30.405.000 | 30.405.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.950.000 | 6.950.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 166.829.000 | 166.768.001 | 60.999 | 99,96 |
| 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.902.800 | 116.064.901 | 7.837.899 | 93,67 |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 52.765.000 | 45.109.301 | 7.655.699 | 85,49 |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66.137.800 | 65.955.600 | 182.200 | 99,72 |



Dinas Sosial

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144.222.600 | 139.039.880 | 5.182.720 | 96,41 |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 120.750.000 | 115.567.280 | 5.182.720 | 95,71 |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 | 100,00 |
| 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 13.272.600 | 13.272.600 | 0 | 100,00 |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.358.126.500 | 1.343.989.684 | 14.136.816 | 98,96 |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial | 251.658.000 | 250.937.700 | 720.300 | 99,71 |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik Mental,Spiritual dan Sosial (Perawatan ODGJ) | 221.658.000 | 221.442.500 | 215.500 | 99,90 |
| 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar (Pemutahiran data PBI) | 30.000.000 | 29.495.200 | 504.800 | 98,32 |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial | 1.106.468.500 | 1.093.051.984 | 13.416.516 | 98,79 |
| 1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan (Sembako lansia 750 paket) | 208.688.000 | 207.598.850 | 1.089.150 | 99,48 |
| 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial (Honor tagana 90 orang, Pelatihan Tagana) | 158.936.000 | 158.189.350 | 746.650 | 99,53 |
| 1.06.04.2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza (Honor Pendamping BPNT 16 orang, Pendataan PMKS, Hibah 4 Orsos) | 308.334.500 | 308.059.184 | 275.316 | 99,91 |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Honor Pendamping PKH 71 orang) | 430.510.000 | 419.204.600 | 11.305.400 | 97,37 |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 164.845.000 | 164.762.595 | 82.405 | 99,95 |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 164.845.000 | 164.762.595 | 82.405 | 99,95 |



Dinas Sosial

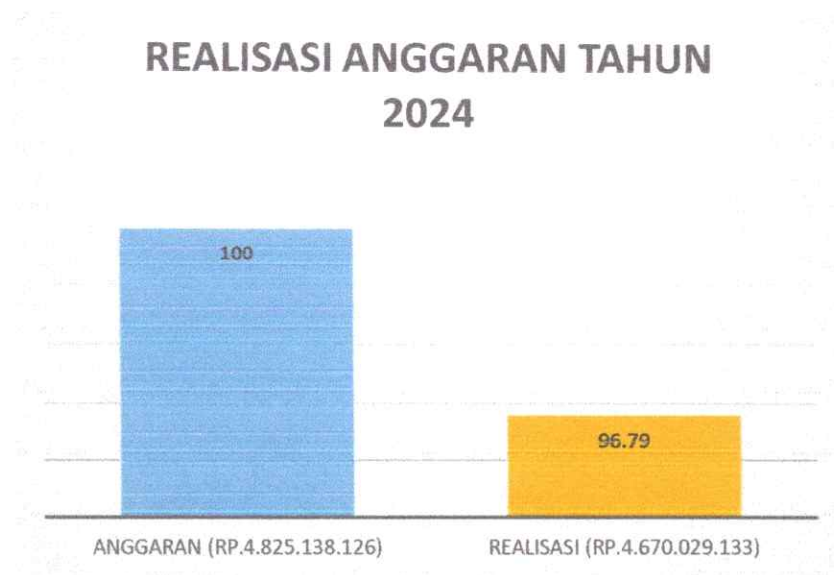
| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan (buffer stock Bencana 100 paket/200 orang) | 164.845.000 | 164.762.595 | 82.405 | 99,95 |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 113.941.800 | 113.938.440 | 3.360 | 100,00 |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 113.941.800 | 113.938.440 | 3.360 | 100,00 |
| 1.06.07.2.01.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 113.941.800 | 113.938.440 | 3.360 | 100,00 |
| | Jumlah Belanja | 4.825.138.126 | 4.670.029.133 | 155.108.993 | 96,79 |



Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 4.825.138.126,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp 4.670.029.133 (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 96,79 persen dengan kriteria penilaian realisasi anggaran **“SANGAT TINGGI”** Dari seluruh sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tercapai 100 persen. Berdasarkan indikator sebagaimana yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 tercapai 100%. Realisasi dari anggaran tahun 2024 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut

Grafik 2

Realiasi anggaran tahun 2024





Untuk efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024

| No | Sasaran strategis | Indicator kinerja | % capaian kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat efisiensi |
|----|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya PMKS Yang Berdaya | % Peningkatan PMKS yang Berdaya | 26 orang | 97,40 | 2,6% |
| 2 | Meningkatnya PMKS Yang Berdaya | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 25.000 orang | 98,20 | 1,8 |
| 3 | Meningkatnya PMKS Yang Berdaya | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.000 orang | 98.33 | 1,67 |

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.



D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan Laporan Kinerja Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini didapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bahan evaluasi kinerja Perangkat daerah dan individu dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Bahan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah
3. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Laporan digunakan sebagai sumber informasi dan memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.

E. Survei Kepuasan Masyarakat pengguna Pelayanan Publik

Pengukuran SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dilaksanakan secara periodik, yaitu Periode Januari s/d Juni 2024 dan Periode Juli s/d Desember 2024. Dari hasil pengukuran SKM Periode Januari s/d Juni 2023 dengan jumlah responden sebanyak 180 orang didapat point **80,49 (Mutu: Baik)**, sedangkan dari hasil pengukuran SKM Periode Juli s/d Desember 2024 dengan jumlah responden 230 orang didapat nilai **81,77083333 (Mutu: Baik)**.



Survey yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jika diakumulasikan untuk tahun 2023 Jumlah kunjungan masyarakat sebanyak 411 orang dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekap Kunjungan Masyarakat

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|------------------------|--------|------------|
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 155 | 49,68% |
| | | Perempuan | 157 | 50,32% |
| | | | 312 | 100,00% |
| 2 | Pendidikan | SD | 105 | 33,65% |
| | | SMP/Sederajat | 55 | 17,63% |
| | | SMA/Sederajat | 141 | 45,19% |
| | | S1/DIV | 11 | 3,53% |
| | | | 312 | 100,00% |
| 3 | Pekerjaan | Buruh | 19 | 6% |
| | | DPRD | 1 | 0,32% |
| | | Irt (Ibu Rumah Tangga) | 57 | 18,27% |
| | | Wirausaha | 11 | 3,53% |
| | | Petani/Pekebun | 126 | 40% |
| | | Pelajar | 54 | 17,31% |
| | | Swasta | 44 | 14,10% |
| | | | 312 | 100,00% |
| 4 | Jenis Layanan | BPJS PBI/KISS | 177 | 56,73% |
| | | BPNT | 32 | 10,26% |
| | | PKH | 34 | 10,90% |
| | | BANTUAN YAPI | 2 | 0,64% |
| | | KIP | 67 | 21,47% |
| | | | 312 | 100,00% |



Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Sosial Kabupaten Lampung pada tahun 2024 Barat sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran dengan mutu **B atau Baik**.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2024 secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah disusun. Terdapat 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan anggaran yang terserap sebesar 98,18% dengan kriteria penilaian realisasi anggaran "SANGAT TINGGI".

Indikator sasaran yang menjadi tugas fungsi Dinas Sosial telah tercapai 100%. Ada 5 unsur pembentuk persentase PMKS, untuk Capaian kinerja sesuai dengan target yang tercapai 100% yaitu PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti pada jenis PMKS anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, serta pada jenis PMKS korban bencana alam.

Untuk penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan dan tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

| Sasaran strategis | Indikator kinerja | % capaian kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat efisiensi |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Meningkatnya PMKS Yang Berdaya | % Peningkatan PMKS yang Berdaya | 26 orang | 97,40 | 2,6% |

B. Faktor Pendukung Keberhasilan



Target Sasaran Strategis dengan indikator kegiatan yang sudah ditentukan telah terlaksana dan dapat memenuhi target yang ada, tentunya diperlukan dukungan pemerintah daerah berupa anggaran yang memadai, Perangkat daerah yang mendukung serta peran mitra Dinas Sosial yaitu Pekerja Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 390 Orang yang terdiri dari 12 jenis profesi. Peran dari PSKS yaitu memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai pekerjaan sosial.

C. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Anggaran yang belum memadai untuk penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan lebih mengutamakan pada sasaran kinerja uang tertuang dalam capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial untuk pelayanan dasar kepada masyarakat
2. Adanya perubahan peraturan dari pusat yang harus diterapkan dan memerlukan waktu untuk penyesuaian terkait dengan target, sasaran, indikator dan capaian yang tidak sesuai dengan renstra yang sudah dibuat
3. Sarana dan prasarana yang perlu diperbarui/ditambah karna ada beberapa fasilitas yang tidak layak digunakan.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut



Langkah-langkah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam menghadapi permasalahan dan kendala yang dialami selama proses pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah:

1. Komitmen pimpinan dan dukungan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Lampung Barat
2. Peningkatan jejaring sinergi antar OPD, Kab/Kota laoin, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun mitra kerja lainnya yang mendukung dalam penanganan PMKS.
3. Pembinaan dan pengawasan para Pekerja Sosial Kabupaten Lampung Barat guna peningkatan penanganan Penyandang PMKS
4. Sumber daya yang proporsional dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.



Lampiran-lampiran

1. Rencana Aksi Kinerja Per Kegiatan
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan
3. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial
Priode 2023-2026
Tahun 2024**

| NO | TUJUAN | | | | | | | | SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|--|--------|----------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SAMPAI DENGAN | | | | REALISASI SAMPAI DENGAN | | | | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SAMPAI DENGAN | | | | REALISASI SAMPAI DENGAN | | | | |
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | | | TW 1 | TW 2 | | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Meningkatnya PMKS Mandiri | Persentase PMKS Mandiri | % | 26% | 29.82% | 32.02% | 41.18% | 38.37% | 56.01% | 64.35% | 84.02% | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Persentase Peningkatan PMKS yang berdaya | Persen | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 87.82% | 70.53% | 89.47% | 89.47% | 91.22% | KEPALA DINAS SOSIAL |
| Rata - Rata Capaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lava, 20 Januari 2024
 Kepala Dinas Sosial
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

 BAHENI S.P.
 NIP. 195508141985031003

**RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM DINAS SOSIAL
PRIODE 2023-2026
TAHUN 2024**

**LAMPIRAN II
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | | | | | | | PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|--|---|
| | | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | Kinerja Per Triwulan | | Keuangan Per Triwulan Akumulatif | | | |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Trw 1= 78.90% | Trw 1= 80.00% | Trw 1= 1,003,439,943 | Trw 1= 554,996,943 | Sekretaris Dinas | |
| | | | | | Trw 2= 78.90% | Trw 2= 80.00% | Trw 2= 1,916,253,243 | Trw 2= 1,601,358,615 | | |
| | | | | | Trw 3= 78.90% | Trw 3= 80.00% | Trw 3= 2,604,922,743 | Trw 3= 2,266,787,673 | | |
| | | | | | Trw 4= 78.90% | Trw 4= 80.00% | Trw 4= 3,188,224,826 | Trw 4= 3,047,338,414 | | |
| 2 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Program Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas | Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi | Trw 1= 39.10% | Trw 1= 44.06% | Trw 1= 158,000,000 | Trw 1= 0 | Kabid Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | | Trw 2= 39.10% | Trw 2= 47.37% | Trw 2= 169,095,000 | Trw 2= 68,413,000 | | |
| | | | | | Trw 3= 39.10% | Trw 3= 47.37% | Trw 3= 221,658,000 | Trw 3= 131,263,000 | | |
| | | | | | Trw 4= 39.10% | Trw 4= 56.09% | Trw 4= 221,658,000 | Trw 4= 221,442,500 | | |
| | | | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin | Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Trw 1= 13.23% | Trw 1= 29.88% | Trw 1= 466,839,000 | Trw 1= 129,298,300 | Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir | |
| | | | | | Trw 2= 13.23% | Trw 2= 28.96% | Trw 2= 724,891,000 | Trw 2= 454,684,550 | | |
| | | | | | Trw 3= 13.23% | Trw 3= 26.98% | Trw 3= 1,024,378,500 | Trw 3= 893,177,334 | | |
| | | | | | Trw 4= 13.23% | Trw 4= 29.34% | Trw 4= 1,136,468,500 | Trw 4= 1,122,547,184 | | |
| | | | | Meningkatnya kualitas layanan rujukan terpadu | IKM | Trw 1= B | Trw 1= B | Trw 1= | Trw 1= | Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| | | | | | | Trw 2= B | Trw 2= B | Trw 2= | Trw 2= | |
| | | | | | | Trw 3= B | Trw 3= B | Trw 3= | Trw 3= | |
| | | | | | | Trw 4= B | Trw 4= B | Trw 4= | Trw 4= | |
| 3 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Program Penangan Bencana | Optimalnya pemberian bantuan bagi korban bencana | Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 | Trw 1= 100.00% | Trw 1= 100.00% | Trw 1= 59,670,000 | Trw 1= 9,373,000 | Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | | Trw 2= 100.00% | Trw 2= 100.00% | Trw 2= 119,460,000 | Trw 2= 37,519,500 | | |
| | | | | | Trw 3= 100.00% | Trw 3= 100.00% | Trw 3= 129,440,000 | Trw 3= 58,344,500 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | hari setelah laporan | Trw 4= 100.00% | Trw 4= 100.00% | Trw 4= 164,845,000 | Trw 4= 164,762,595 | |
| 4 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % komponen utama taman makam pahlawan | Trw 1= 0.00% | Trw 1= 0.00% | Trw 1= 14,854,940 | Trw 1= 8,661,600 | Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| | | | | | Trw 2= 78.57% | Trw 2= 78.57% | Trw 2= 86,941,800 | Trw 2= 77,207,220 | |
| | | | | | Trw 3= 78.57% | Trw 3= 78.57% | Trw 3= 89,941,800 | Trw 3= 86,427,220 | |
| | | | | | Trw 4= 78.57% | Trw 4= 78.57% | Trw 4= 113,941,800 | Trw 4= 113,938,440 | |

Liwa, 29 Januari 2024
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



JALIN S.I.P
 NIP. 196308111985031003

**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Sosial
Periode 2023-2026
Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Kinerja Per triwulan Akumulatif | | Keuangan Per triwulan Akumulatif | | Nama Jabatan Penanggung Jawab | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | Target (Rp) | Realisasi | | | | | |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | TW 1 | : 4 Dokumen | TW 1 | : 4 Dokumen | TW 1 | 5.000.000 | TW 1 | 2.000.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 4 Dokumen | TW 2 | : 4 Dokumen | TW 2 | 5.000.000 | TW 2 | 4.993.500 | |
| | | | | | | TW 3 | : 4 Dokumen | TW 3 | : 4 Dokumen | TW 3 | 5.000.000 | TW 3 | 4.993.500 | |
| | | | | | | TW 4 | : 4 Dokumen | TW 4 | : 4 Dokumen | TW 4 | 5.000.000 | TW 4 | 4.993.500 | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Realisasi | TW 1 | : 0 Dokumen | TW 1 | : 0 Dokumen | TW 1 | - | TW 1 | - | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 1 Dokumen | TW 2 | : 1 Dokumen | TW 2 | 7.775.000 | TW 2 | 7.770.500 | |
| | | | | | | TW 3 | : 4 Dokumen | TW 3 | : 4 Dokumen | TW 3 | 13.220.000 | TW 3 | 13.212.500 | |
| | | | | | | TW 4 | : 6 Dokumen | TW 4 | : 6 Dokumen | TW 4 | 23.035.000 | TW 4 | 23.015.500 | |
| | | | | Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TW 1 | : 11 Laporan | TW 1 | : 11 Laporan | TW 1 | 5.000.000 | TW 1 | 3.000.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 12 Laporan | TW 2 | : 12 Laporan | TW 2 | 5.000.000 | TW 2 | 4.998.000 | |
| | | | | | | TW 3 | : 13 Laporan | TW 3 | : 13 Laporan | TW 3 | 5.000.000 | TW 3 | 4.998.000 | |
| | | | | | | TW 4 | : 14 Laporan | TW 4 | : 14 Laporan | TW 4 | 8.460.000 | TW 4 | 8.457.500 | |
| 2 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Tersedianya Gap dan Tanggapan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | TW 1 | : 26 Orang | TW 1 | : 27 Orang | TW 1 | 770.511.740 | TW 1 | 487.019.672 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 26 Orang | TW 2 | : 27 Orang | TW 2 | 1.552.207.340 | TW 2 | 1.305.748.548 | |
| | | | | | | TW 3 | : 26 Orang | TW 3 | : 27 Orang | TW 3 | 2.127.921.140 | TW 3 | 1.806.271.458 | |
| | | | | | | TW 4 | : 26 Orang | TW 4 | : 27 Orang | TW 4 | 2.604.798.920 | TW 4 | 2.477.027.632 | |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | TW 1 | : 0 Laporan | TW 1 | : 0 Laporan | TW 1 | - | TW 1 | - | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 0 Laporan | TW 2 | : 0 Laporan | TW 2 | - | TW 2 | - | |
| | | | | | | TW 3 | : 0 Laporan | TW 3 | : 0 Laporan | TW 3 | - | TW 3 | - | |
| | | | | | | TW 4 | : 1 Laporan | TW 4 | : 1 Laporan | TW 4 | 3.000.000 | TW 4 | 3.000.000 | |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | TW 1 | : 0 Laporan | TW 1 | : 0 Laporan | TW 1 | 2.455.000 | TW 1 | 1.810.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 1 Laporan | TW 2 | : 1 Laporan | TW 2 | 2.455.000 | TW 2 | 2.455.000 | |
| | | | | | | TW 3 | : 1 Laporan | TW 3 | : 1 Laporan | TW 3 | 2.455.000 | TW 3 | 2.455.000 | |
| | | | | | | TW 4 | : 2 Laporan | TW 4 | : 2 Laporan | TW 4 | 2.455.000 | TW 4 | 2.455.000 | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran | TW 1 | : 0 Dokumen | TW 1 | : 0 Dokumen | TW 1 | - | TW 1 | - | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | TW 2 | : 1 Dokumen | TW 2 | : 1 Dokumen | TW 2 | 2.500.000 | TW 2 | 2.500.000 | |
| | | | | | | TW 3 | : 1 Dokumen | TW 3 | : 1 Dokumen | TW 3 | 2.500.000 | TW 3 | 2.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 3 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Tersedianya Rencana Keutuhan Barang Milik Daerah (SKPD) | Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD) | T w 1 : 1 Dokumen | T w 1 : 1 Dokumen | T w 1 : 2.500.000 | T w 1 : 2.500.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 1 Dokumen | T w 2 : 1 Dokumen | T w 2 : 10.275.000 | T w 2 : 10.275.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 1 Dokumen | T w 3 : 1 Dokumen | T w 3 : 10.275.000 | T w 3 : 10.275.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 1 Dokumen | T w 4 : 1 Dokumen | T w 4 : 10.275.000 | T w 4 : 10.275.000 | |
| 4 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terdilaksanakannya Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Kinerja Pegawai | T w 1 : 1 Dokumen | T w 1 : 1 Dokumen | T w 1 : 2.430.000 | T w 1 : 2.430.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 1 Dokumen | T w 2 : 1 Dokumen | T w 2 : 4.860.000 | T w 2 : 4.860.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 1 Dokumen | T w 3 : 1 Dokumen | T w 3 : 7.290.000 | T w 3 : 7.290.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 1 Dokumen | T w 4 : 1 Dokumen | T w 4 : 13.161.000 | T w 4 : 13.161.000 | |
| 5 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | T w 1 : 1 Paket | T w 1 : 1 Paket | T w 1 : 6.730.500 | T w 1 : 3.280.500 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 1 Paket | T w 2 : 1 Paket | T w 2 : 6.730.500 | T w 2 : 6.730.500 | |
| | | | | | | T w 3 : 1 Paket | T w 3 : 1 Paket | T w 3 : 6.730.500 | T w 3 : 6.730.500 | |
| | | | | | | T w 4 : 1 Paket | T w 4 : 1 Paket | T w 4 : 6.730.500 | T w 4 : 6.730.500 | |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | T w 1 : 1 Paket | T w 1 : 1 Paket | T w 1 : 1.500.000 | T w 1 : 1.500.000 | |
| | | | | | | T w 2 : 1 Paket | T w 2 : 1 Paket | T w 2 : 1.500.000 | T w 2 : 1.500.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 1 Paket | T w 3 : 1 Paket | T w 3 : 1.500.000 | T w 3 : 1.500.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 1 Paket | T w 4 : 1 Paket | T w 4 : 1.500.000 | T w 4 : 1.500.000 | |
| | | | | Tersedianya Barang Cetakam dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakam dan Penggandaan yang disediakan | T w 1 : 3 Paket | T w 1 : 3 Paket | T w 1 : 10.600.500 | T w 1 : 10.600.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 6 Paket | T w 2 : 6 Paket | T w 2 : 15.700.000 | T w 2 : 11.200.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 9 Paket | T w 3 : 9 Paket | T w 3 : 20.800.000 | T w 3 : 15.300.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 12 Paket | T w 4 : 12 Paket | T w 4 : 30.405.000 | T w 4 : 20.405.000 | |
| | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | T w 1 : 8 Dokumen | T w 1 : 8 Dokumen | T w 1 : 3.000.000 | T w 1 : 3.000.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 8 Dokumen | T w 2 : 8 Dokumen | T w 2 : 6.000.000 | T w 2 : 6.000.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 8 Dokumen | T w 3 : 8 Dokumen | T w 3 : 9.000.000 | T w 3 : 9.000.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 8 Dokumen | T w 4 : 8 Dokumen | T w 4 : 12.000.000 | T w 4 : 12.000.000 | |
| | | | | Terdilaksanakannya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | T w 1 : 3 Laporan | T w 1 : 3 Laporan | T w 1 : 1.730.000 | T w 1 : 1.722.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 6 Laporan | T w 2 : 6 Laporan | T w 2 : 3.470.000 | T w 2 : 2.927.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 9 Laporan | T w 3 : 9 Laporan | T w 3 : 5.210.000 | T w 3 : 4.763.000 | |
| | | | | | | T w 4 : 12 Laporan | T w 4 : 12 Laporan | T w 4 : 6.950.000 | T w 4 : 6.930.000 | |
| | | | | Terdilaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | T w 1 : 3 Laporan | T w 1 : 3 Laporan | T w 1 : 66.193.000 | T w 1 : 48.633.500 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 6 Laporan | T w 2 : 6 Laporan | T w 2 : 112.859.000 | T w 2 : 94.915.215 | |
| | | | | | | T w 3 : 9 Laporan | T w 3 : 9 Laporan | T w 3 : 152.989.000 | T w 3 : 127.151.170 | |
| | | | | | | T w 4 : 12 Laporan | T w 4 : 12 Laporan | T w 4 : 199.829.000 | T w 4 : 166.708.001 | |
| 6 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | T w 1 : 1 Unit | T w 1 : 1 Unit | T w 1 : 7.000.000 | T w 1 : 7.000.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | | | T w 2 : 1 Unit | T w 2 : 1 Unit | T w 2 : 7.000.000 | T w 2 : 7.000.000 | |
| | | | | | | T w 3 : 1 Unit | T w 3 : 1 Unit | T w 3 : 7.000.000 | T w 3 : 7.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | | Tersedianya Perawatan dan Mesin Jahitnya | Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Jahitnya yang disediakan | TW 1 : 1 Unit TW 2 : 1 Unit TW 3 : 1 Unit TW 4 : 1 Unit | TW 1 : 1 Unit TW 2 : 1 Unit TW 3 : 1 Unit TW 4 : 1 Unit | TW 1 : 7.000.000 TW 2 : 15.000.000 TW 3 : 15.000.000 TW 4 : 15.000.000 | TW 1 : 7.000.000 TW 2 : 15.000.000 TW 3 : 15.000.000 TW 4 : 15.000.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| 7 | Memungkainya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 Laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 2.400.000 TW 2 : 4.800.000 TW 3 : 4.800.000 TW 4 : 5.600.000 | TW 1 : 2.600.000 TW 2 : 4.000.000 TW 3 : 4.600.000 TW 4 : 5.600.000 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 Laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 13.565.000 TW 2 : 26.765.000 TW 3 : 39.865.000 TW 4 : 52.765.000 | TW 1 : 9.706.541 TW 2 : 19.185.672 TW 3 : 31.879.165 TW 4 : 45.109.301 | Sekretaris Dinas Sosial |
| | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 3 Laporan TW 2 : 6 Laporan TW 3 : 9 Laporan TW 4 : 12 Laporan | TW 1 : 17.285.200 TW 2 : 33.861.400 TW 3 : 49.569.600 TW 4 : 66.137.800 | TW 1 : 4.649.200 TW 2 : 32.610.400 TW 3 : 47.808.100 TW 4 : 65.955.600 | Sekretaris Dinas Sosial |
| 8 | Memungkainya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pemeliharaan Burang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselaksananya Pemeliharaan Burang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Burang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | TW 1 : 5 Unit TW 2 : 14 Unit TW 3 : 41 Unit TW 4 : 58 Unit | TW 1 : 5 Unit TW 2 : 14 Unit TW 3 : 41 Unit TW 4 : 58 Unit | TW 1 : 56.192.500 TW 2 : 92.795.000 TW 3 : 118.397.500 TW 4 : 144.222.000 | TW 1 : 27.645.536 TW 2 : 85.694.280 TW 3 : 112.665.280 TW 4 : 149.009.880 | Sekretaris Dinas Sosial |
| 9 | Memungkainya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Celandangan Pengemis di Luar Pantas Sosial | Terselaksananya Pembinaan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota | TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang | TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang | TW 1 : 158.000.000 TW 2 : 199.095.000 TW 3 : 221.658.000 TW 4 : 221.658.000 | TW 1 : TW 2 : 68.413.000 TW 3 : 141.263.000 TW 4 : 221.442.500 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| | | | | Terselaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota | TW 1 : 200 orang TW 2 : 500 orang TW 3 : 750 orang TW 4 : 1000 orang | TW 1 : 205 orang TW 2 : 568 orang TW 3 : 750 orang TW 4 : 9829 orang | TW 1 : 18.025.000 TW 2 : 27.437.500 TW 3 : 30.000.000 TW 4 : 30.000.000 | TW 1 : TW 2 : 22.276.500 TW 3 : 29.495.200 TW 4 : 29.495.200 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 10 | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantas Sosial | Terselaksananya Pembinaan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota | TW 1 : 0 orang TW 2 : 0 orang TW 3 : 750 orang TW 4 : 750 orang | TW 1 : 0 orang TW 2 : 0 orang TW 3 : 750 orang TW 4 : 750 orang | TW 1 : 19.493.000 TW 2 : 49.273.000 TW 3 : 204.788.000 TW 4 : 208.688.000 | TW 1 : TW 2 : 25.852.000 TW 3 : 192.393.350 TW 4 : 207.598.850 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | Terselaksananya Pembinaan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota | TW 1 : 90 orang TW 2 : 90 orang | TW 1 : 90 orang TW 2 : 90 orang | TW 1 : 70.000.000 TW 2 : 124.436.000 | TW 1 : 1.737.500 TW 2 : 74.105.500 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Trw 3 : 90 orang | Trw 3 : 90 orang | Trw 3 : 154,586,000 | Trw 3 : 130,586,850 | |
| | | | | | | Trw 4 : 90 orang | Trw 4 : 90 orang | Trw 4 : 158,936,000 | Trw 4 : 158,189,350 | |
| | | | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Trw 1 : 25.000 orang | Trw 1 : 29.432 orang | Trw 1 : 203,547,000 | Trw 1 : 47,434,800 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| | | | | | | Trw 2 : 25.000 orang | Trw 2 : 28.512 orang | Trw 2 : 270,534,500 | Trw 2 : 91,090,800 | |
| | | | | | | Trw 3 : 25.000 orang | Trw 3 : 24.255 orang | Trw 3 : 289,434,500 | Trw 3 : 216,364,184 | |
| | | | | | | Trw 4 : 25.000 orang | Trw 4 : 28274 Orang | Trw 4 : 308,334,500 | Trw 4 : 308,059,184 | |
| | | | | Terlaksananya Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Trw 1 : 15.000 orang | Trw 1 : 15.737 orang | Trw 1 : 155,678,000 | Trw 1 : 80,126,000 | Kepala Bidang Pembordayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| | | | | | | Trw 2 : 15.000 orang | Trw 2 : 15.262 orang | Trw 2 : 253,310,000 | Trw 2 : 241,275,750 | |
| | | | | | | Trw 3 : 15.000 orang | Trw 3 : 15.781 orang | Trw 3 : 345,570,000 | Trw 3 : 326,337,750 | |
| | | | | | | Trw 4 : 15.000 orang | Trw 4 : 15.323 orang | Trw 4 : 430,510,000 | Trw 4 : 419,204,600 | |
| 11 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Permakaman 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Permakaman 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota | Trw 1 : 50 Orang | Trw 1 : 28 Orang | Trw 1 : 59,670,000 | Trw 1 : 9,373,000 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | | | Trw 2 : 200 Orang | Trw 2 : 60 Orang | Trw 2 : 119,460,000 | Trw 2 : 37,519,500 | |
| | | | | | | Trw 3 : 200 Orang | Trw 3 : 155 Orang | Trw 3 : 129,440,000 | Trw 3 : 58,344,500 | |
| | | | | | | Trw 4 : 320 Orang | Trw 4 : 320 Orang | Trw 4 : 164,845,000 | Trw 4 : 164,762,595 | |
| 12 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional | Trw 1 : 0 Dokumen | Trw 1 : 0 Dokumen | Trw 1 : 14,854,940 | Trw 1 : 8,661,600 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| | | | | | | Trw 2 : 1 Dokumen | Trw 2 : 1 Dokumen | Trw 2 : 86,941,800 | Trw 2 : 77,207,220 | |
| | | | | | | Trw 3 : 1 Dokumen | Trw 3 : 1 Dokumen | Trw 3 : 89,941,800 | Trw 3 : 86,427,220 | |
| | | | | | | Trw 4 : 1 Dokumen | Trw 4 : 1 Dokumen | Trw 4 : 113,941,800 | Trw 4 : 113,938,440 | |

Liwa, 29 Januari 2024

KEPALA BIDANG SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Sosial
Periode 2023-2026
Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Kinerja Per triwulan Akumulatif | | Kemungkinan Per triwulan Akumulatif | | Nama Jabatan Penanggung Jawab | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------|--|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Target (Rp) | Realisasi | | | | | |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Trw 1 | : 4 Dokumen | Trw 1 | : 4 Dokumen | Trw 1 | : 5.000.000 | Trw 1 | : 2.620.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 4 Dokumen | Trw 2 | : 4 Dokumen | Trw 2 | : 5.000.000 | Trw 2 | : 4.993.500 | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 4 Dokumen | Trw 3 | : 4 Dokumen | Trw 3 | : 5.000.000 | Trw 3 | : 4.993.500 | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 4 Dokumen | Trw 4 | : 4 Dokumen | Trw 4 | : 5.000.000 | Trw 4 | : 4.993.500 | |
| 2 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Persedianya dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | | Trw 1 | | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | | Trw 2 | | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 1 Dokumen | Trw 3 | : 1 Dokumen | Trw 3 | | Trw 3 | | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 2 Dokumen | Trw 4 | : 2 Dokumen | Trw 4 | : 4.385.000 | Trw 4 | : 4.378.500 | |
| 3 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Persedianya dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | | Trw 1 | | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 1 Dokumen | Trw 2 | : 1 Dokumen | Trw 2 | : 7.775.000 | Trw 2 | : 7.770.500 | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 2 Dokumen | Trw 3 | : 2 Dokumen | Trw 3 | : 7.775.000 | Trw 3 | : 7.770.500 | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 2 Dokumen | Trw 4 | : 2 Dokumen | Trw 4 | : 7.775.000 | Trw 4 | : 7.770.500 | |
| 4 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Persedianya dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA SKPD | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | | Trw 1 | | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | | Trw 2 | | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 0 Dokumen | Trw 3 | : 0 Dokumen | Trw 3 | | Trw 3 | : 3.030.000 | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 1 Dokumen | Trw 4 | : 1 Dokumen | Trw 4 | : 5.430.000 | Trw 4 | : 5.424.500 | |
| 5 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | Persedianya dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | : 0 Dokumen | Trw 1 | | Trw 1 | | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | : 0 Dokumen | Trw 2 | | Trw 2 | | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 1 Dokumen | Trw 3 | : 1 Dokumen | Trw 3 | : 5.445.000 | Trw 3 | : 4.442.000 | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 1 Dokumen | Trw 4 | : 1 Dokumen | Trw 4 | : 5.445.000 | Trw 4 | : 5.442.000 | |
| 6 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD | Persedianya Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD | Trw 1 | : 1 Laporan | Trw 1 | : 1 Laporan | Trw 1 | | Trw 1 | | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 2 Laporan | Trw 2 | : 2 Laporan | Trw 2 | | Trw 2 | | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 3 Laporan | Trw 3 | : 3 Laporan | Trw 3 | | Trw 3 | | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 4 Laporan | Trw 4 | : 4 Laporan | Trw 4 | : 3.450.000 | Trw 4 | : 3.459.500 | |
| 7 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Trw 1 | : 10 Laporan | Trw 1 | : 10 Laporan | Trw 1 | : 5.000.000 | Trw 1 | : 3.000.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Trw 2 | : 10 Laporan | Trw 2 | : 10 Laporan | Trw 2 | : 5.000.000 | Trw 2 | : 4.998.000 | |
| | | | | | | | Trw 3 | : 10 Laporan | Trw 3 | : 10 Laporan | Trw 3 | : 5.000.000 | Trw 3 | : 4.998.000 | |
| | | | | | | | Trw 4 | : 10 Laporan | Trw 4 | : 10 Laporan | Trw 4 | : 5.000.000 | Trw 4 | : 4.998.000 | |
| 8 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Trw 1 | : 27 Orang | Trw 1 | : 27 Orang | Trw 1 | : 776.511.743 | Trw 1 | : 447.019.072 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 | : 27 Orang | Trw 2 | : 27 Orang | Trw 2 | : 1.552.207.343 | Trw 2 | : 1.305.748.598 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | Ttw 3 : 27 Orang | Ttw 3 : 27 orang | Ttw 3 : 2.127.921.143 | Ttw 3 : 1.866.271.938 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 27 Orang | Ttw 4 : 27 orang | Ttw 4 : 2.004.798.929 | Ttw 4 : 2.477.027.932 | |
| 9 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEUANGAN PEJANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Ttw 1 : 0 Laporan | Ttw 1 : 0 Laporan | Ttw 1 | Ttw 1 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Alih Mada |
| | | | | | | | Ttw 2 : 0 Laporan | Ttw 2 : 0 Laporan | Ttw 2 | Ttw 2 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 0 Laporan | Ttw 3 : 0 Laporan | Ttw 3 | Ttw 3 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Laporan | Ttw 4 : 1 Laporan | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 10 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEUANGAN PEJANGKAT DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Ttw 1 : 0 Laporan | Ttw 1 : 0 Laporan | Ttw 1 : 2.455.000 | Ttw 1 : 1.819.000 | Analisis keuangan Pusat dan Daerah Alih Mada |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Laporan | Ttw 2 : 1 Laporan | 2.455.000 | 2.455.000 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Laporan | Ttw 3 : 1 Laporan | 2.455.000 | 2.455.000 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 2 Laporan | Ttw 4 : 2 Laporan | 2.455.000 | 2.455.000 | |
| 11 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEUANGAN PEJANGKAT DAERAH | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Diagnosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Ttw 1 : 0 Dokumen | Ttw 1 : 0 Dokumen | Ttw 1 | Ttw 1 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Alih Mada |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Dokumen | Ttw 2 : 1 Dokumen | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Dokumen | Ttw 3 : 1 Dokumen | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Dokumen | Ttw 4 : 1 Dokumen | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 12 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PEJANGKAT DAERAH | Penyusunan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Ttw 1 : 1 Dokumen | Ttw 1 : 1 Dokumen | Ttw 1 : 10.275.000 | Ttw 1 : 3.000.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Dokumen | Ttw 2 : 1 Dokumen | 10.275.000 | 10.270.000 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Dokumen | Ttw 3 : 1 Dokumen | 10.275.000 | 10.270.000 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Dokumen | Ttw 4 : 1 Dokumen | 10.275.000 | 10.270.000 | |
| 13 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ADMINISTRASI KEPECAWAJIAN PEJANGKAT DAERAH | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Perlaksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Ttw 1 : 1 Dokumen | Ttw 1 : 1 Dokumen | Ttw 1 : 2.430.000 | Ttw 1 : 2.430.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Dokumen | Ttw 2 : 1 Dokumen | 4.860.000 | 4.860.000 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Dokumen | Ttw 3 : 1 Dokumen | 7.290.000 | 7.290.000 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Dokumen | Ttw 4 : 1 Dokumen | 13.161.000 | 13.161.000 | |
| 14 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan | Ttw 1 : 1 Paket | Ttw 1 : 1 Paket | Ttw 1 : 6.730.500 | Ttw 1 : 3.280.500 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Paket | Ttw 2 : 1 Paket | 6.730.500 | 6.730.500 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Paket | Ttw 3 : 1 Paket | 6.730.500 | 6.730.500 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Paket | Ttw 4 : 1 Paket | 6.730.500 | 6.730.500 | |
| 15 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Ttw 1 : 1 Paket | Ttw 1 : 1 Paket | Ttw 1 : 1.500.000 | Ttw 1 : 1.500.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Ttw 2 : 1 Paket | Ttw 2 : 1 Paket | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | | | | | | | Ttw 3 : 1 Paket | Ttw 3 : 1 Paket | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | | | | | | | Ttw 4 : 1 Paket | Ttw 4 : 1 Paket | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 16 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetak dan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket barang Cetak dan | Ttw 1 : 3 Paket | Ttw 1 : 3 paket | Ttw 1 : 10.600.000 | Ttw 1 : 10.600.000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA | | Pengadaan | | Pengadaan yang disediakan | Tiw 2 : 6 Paket | Tiw 2 : 6 Paket | Tiw 2 : 15.700,000 | Tiw 2 : 11.250,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Paket | Tiw 3 : 9 Paket | Tiw 3 : 20.800,000 | Tiw 3 : 16.300,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Paket | Tiw 4 : 12 Paket | Tiw 4 : 30.405,000 | Tiw 4 : 30.405,000 | |
| 17 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang disediakan | Jumlah dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Tiw 1 : 8 Dokumen | Tiw 1 : 8 Dokumen | Tiw 1 : 3.000,000 | Tiw 1 : 3.000,000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 8 Dokumen | Tiw 2 : 8 Dokumen | Tiw 2 : 6.000,000 | Tiw 2 : 6.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 8 Dokumen | Tiw 3 : 8 Dokumen | Tiw 3 : 9.000,000 | Tiw 3 : 9.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 8 Dokumen | Tiw 4 : 8 Dokumen | Tiw 4 : 12.000,000 | Tiw 4 : 12.000,000 | |
| 18 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 1.730,000 | Tiw 1 : 1.722,000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 3.470,000 | Tiw 2 : 2.927,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 5.210,000 | Tiw 3 : 4.763,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 6.950,000 | Tiw 4 : 6.950,000 | |
| 19 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 66.165,000 | Tiw 1 : 18.633,500 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 112.850,000 | Tiw 2 : 64.915,215 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 152.980,000 | Tiw 3 : 97.151,170 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 166.820,000 | Tiw 4 : 166.798,000 | |
| 20 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Tiw 1 : 1 Unit | Tiw 1 : 1 Unit | Tiw 1 : 7.000,000 | Tiw 1 : 7.000,000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 1 Unit | Tiw 2 : 1 Unit | Tiw 2 : 7.000,000 | Tiw 2 : 7.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 1 Unit | Tiw 3 : 1 Unit | Tiw 3 : 7.000,000 | Tiw 3 : 7.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 1 Unit | Tiw 4 : 1 Unit | Tiw 4 : 7.000,000 | Tiw 4 : 7.000,000 | |
| 21 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Tiw 1 : 1 Unit | Tiw 1 : 1 Unit | Tiw 1 : 16.000,000 | Tiw 1 : 16.000,000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 1 Unit | Tiw 2 : 1 Unit | Tiw 2 : 16.000,000 | Tiw 2 : 16.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 1 Unit | Tiw 3 : 1 Unit | Tiw 3 : 16.000,000 | Tiw 3 : 16.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 1 Unit | Tiw 4 : 1 Unit | Tiw 4 : 16.000,000 | Tiw 4 : 16.000,000 | |
| 22 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 2.000,000 | Tiw 1 : 2.000,000 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 4.000,000 | Tiw 2 : 4.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 4.000,000 | Tiw 3 : 4.000,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 5.000,000 | Tiw 4 : 5.000,000 | |
| 23 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 13.565,000 | Tiw 1 : 9.706,541 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 26.765,000 | Tiw 2 : 19.185,072 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 39.865,000 | Tiw 3 : 31.870,165 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 52.765,000 | Tiw 4 : 45.109,301 | |
| 24 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 3 Laporan | Tiw 1 : 17.285,200 | Tiw 1 : 4.619,200 | Kasubag Umum dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 6 Laporan | Tiw 2 : 33.361,400 | Tiw 2 : 32.610,400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 9 Laporan | Tiw 3 : 49,599,600 | Tiw 3 : 47,898,160 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 12 Laporan | Tiw 4 : 96,137,800 | Tiw 4 : 65,955,600 | |
| 25 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Perselesaiannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan | Tiw 1 : 3 unit | Tiw 1 : 3 unit | Tiw 1 : 41,912,500 | Tiw 1 : 24,765,530 | Kasubag Umbara dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 5 unit | Tiw 2 : 5 unit | Tiw 2 : 75,275,000 | Tiw 2 : 68,174,280 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 27 unit | Tiw 3 : 27 unit | Tiw 3 : 99,637,500 | Tiw 3 : 93,705,280 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 36 unit | Tiw 4 : 36 unit | Tiw 4 : 120,750,000 | Tiw 4 : 115,567,280 | |
| 26 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perselesaiannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Tiw 1 : 4 unit | Tiw 1 : 4 unit | Tiw 1 : 2,940,000 | Tiw 1 : 2,940,000 | Kasubag Umbara dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 7 unit | Tiw 2 : 7 unit | Tiw 2 : 5,130,000 | Tiw 2 : 5,130,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 9 unit | Tiw 3 : 9 unit | Tiw 3 : 6,570,000 | Tiw 3 : 6,570,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 11 unit | Tiw 4 : 11 unit | Tiw 4 : 10,200,000 | Tiw 4 : 10,200,000 | |
| 27 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /dirshabilitasi | Tiw 1 : 0 gedung | Tiw 1 : 0 gedung | Tiw 1 : 11,340,000 | Tiw 1 : 11,340,000 | Kasubag Umbara dan Perencanaan |
| | | | | | | | Tiw 2 : 2 gedung | Tiw 2 : 2 gedung | Tiw 2 : 12,390,000 | Tiw 2 : 12,390,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 2 gedung | Tiw 3 : 2 gedung | Tiw 3 : 12,390,000 | Tiw 3 : 12,390,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 2 gedung | Tiw 4 : 2 gedung | Tiw 4 : 13,272,600 | Tiw 4 : 13,272,600 | |
| 28 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar Anak Terantar Lanjut Usia Terantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian, Bantuan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kesenangan kabupaten/kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kesenangan kabupaten/kota | Tiw 1 : 8 orang | Tiw 1 : 8 orang | Tiw 1 : 158,000,000 | Tiw 1 : 158,000,000 | Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Tiw 2 : 8 orang | Tiw 2 : 8 orang | Tiw 2 : 169,095,000 | Tiw 2 : 68,413,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 8 orang | Tiw 3 : 8 orang | Tiw 3 : 221,658,000 | Tiw 3 : 131,263,000 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 8 orang | Tiw 4 : 8 orang | Tiw 4 : 221,658,000 | Tiw 4 : 221,442,500 | |
| 29 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar Anak Terantar Lanjut Usia Terantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kesenangan kabupaten/kota | Tiw 1 : 200 orang | Tiw 1 : 265 orang | Tiw 1 : 18,025,000 | Tiw 1 : 18,025,000 | Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Tiw 2 : 500 orang | Tiw 2 : 568 orang | Tiw 2 : 27,437,500 | Tiw 2 : 22,270,500 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 750 orang | Tiw 3 : 750 orang | Tiw 3 : 30,000,000 | Tiw 3 : 29,495,200 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 1000 orang | Tiw 4 : 3829 orang | Tiw 4 : 30,000,000 | Tiw 4 : 29,495,200 | |
| 30 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan BAZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Pemukiman | Terpenuhi kebutuhan Pemukiman Per Orang sesuai dengan standar gizi minimal kesenangan kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan Pemukiman kebantuan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kesenangan kabupaten/kota | Tiw 1 : 0 orang | Tiw 1 : 0 orang | Tiw 1 : 19,493,000 | Tiw 1 : 19,493,000 | Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Tiw 2 : 0 orang | Tiw 2 : 0 orang | Tiw 2 : 49,270,000 | Tiw 2 : 25,852,000 | |
| | | | | | | | Tiw 3 : 750 orang | Tiw 3 : 750 orang | Tiw 3 : 204,788,000 | Tiw 3 : 192,493,350 | |
| | | | | | | | Tiw 4 : 750 orang | Tiw 4 : 750 orang | Tiw 4 : 208,688,000 | Tiw 4 : 207,598,800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 31 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA di Luar Pantii Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota | Trw 1 : 90 orang | Trw 1 : 90 orang | Trw 1 : 70,096,000 | Trw 1 : 1,737,500 | Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 : 90 orang | Trw 2 : 90 orang | Trw 2 : 124,336,000 | Trw 2 : 74,195,500 | |
| | | | | | | | Trw 3 : 90 orang | Trw 3 : 90 orang | Trw 3 : 154,586,000 | Trw 3 : 130,586,850 | |
| | | | | | | | Trw 4 : 90 orang | Trw 4 : 90 orang | Trw 4 : 158,936,000 | Trw 4 : 158,189,350 | |
| 32 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA di Luar Pantii Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA | Trw 1 : 25.000 orang | Trw 1 : 29.432 orang | Trw 1 : 203,547,000 | Trw 1 : 47,434,800 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 : 25.000 orang | Trw 2 : 28.512 orang | Trw 2 : 270,534,500 | Trw 2 : 91,090,800 | |
| | | | | | | | Trw 3 : 25.000 orang | Trw 3 : 24.255 orang | Trw 3 : 289,434,500 | Trw 3 : 216,364,184 | |
| | | | | | | | Trw 4 : 25.000 orang | Trw 4 : 28274 Orang | Trw 4 : 308,334,500 | Trw 4 : 308,059,184 | |
| 33 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA di Luar Pantii Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Kewenangan Kabupaten/kota | Trw 1 : 15.000 orang | Trw 1 : 15.737 orang | Trw 1 : 155,678,000 | Trw 1 : 80,126,000 | Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 : 15.000 orang | Trw 2 : 15.262 orang | Trw 2 : 253,310,000 | Trw 2 : 241,275,750 | |
| | | | | | | | Trw 3 : 15.000 orang | Trw 3 : 15.781 orang | Trw 3 : 345,570,000 | Trw 3 : 326,337,750 | |
| | | | | | | | Trw 4 : 15.000 orang | Trw 4 : 15.323 orang | Trw 4 : 430,510,000 | Trw 4 : 419,204,600 | |
| 34 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Penyediaan Makanan | Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota | Trw 1 : 50 Orang | Trw 1 : 28 Orang | Trw 1 : 59,670,000 | Trw 1 : 9,373,000 | Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 : 200 Orang | Trw 2 : 60 Orang | Trw 2 : 119,460,000 | Trw 2 : 37,519,500 | |
| | | | | | | | Trw 3 : 200 Orang | Trw 3 : 155 Orang | Trw 3 : 129,440,000 | Trw 3 : 58,344,500 | |
| | | | | | | | Trw 4 : 320 Orang | Trw 4 : 320 Orang | Trw 4 : 164,845,000 | Trw 4 : 164,762,595 | |
| 35 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Trw 1 : 0 Dokumen | Trw 1 : 0 Dokumen | Trw 1 : 14,854,940 | Trw 1 : 8,661,600 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| | | | | | | | Trw 2 : 1 Dokumen | Trw 2 : 1 Dokumen | Trw 2 : 86,941,800 | Trw 2 : 77,207,220 | |
| | | | | | | | Trw 3 : 1 Dokumen | Trw 3 : 1 Dokumen | Trw 3 : 89,941,800 | Trw 3 : 86,427,220 | |
| | | | | | | | Trw 4 : 1 Dokumen | Trw 4 : 1 Dokumen | Trw 4 : 113,941,800 | Trw 4 : 113,938,440 | |

322,962,000
573,816,500

91,236,500
401,113,250

28,2499179
69,9027041





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811

Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAIMIN, S.I.P
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nukman
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 29 Januari 2024

Pj. Bupati Lampung Barat
Pihak Kedua,

NUKMAN

Pihak Pertama,

JAIMIN, S.I.P
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2024

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET |
|-----|--------------------------------|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | | |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang Berdaya | Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | 87.82% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota | 3.082.279.600 | |
| Kegiatan | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.495.000 | |
| Sub Kegiatan | | |
| 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : | 5.000.000 | APBD |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : | 4.385.000 | APBD |
| 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD : | 7.775.000 | APBD |
| 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD : | 5.430.000 | APBD |
| 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD : | 5.445.000 | APBD |
| 6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : | 3.460.000 | APBD |
| 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : | 5.000.000 | APBD |
| Kegiatan | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.519.783.700 | |
| Sub Kegiatan | | |
| 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : | 2.511.828.700 | APBD |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : | 3.000.000 | APBD |

| | | | |
|--|---|-------------|------|
| 3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / | : | 2.455.000 | APBD |
| 4 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | : | 2.500.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitiasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 10.275.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | : | 10.275.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitiasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 13.161.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | : | 13.161.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitiasi Umum perangkat Daerah | | 211.439.500 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | : | 6.730.500 | APBD |
| 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | : | 1.500.000 | APBD |
| 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | : | 30.405.000 | APBD |
| 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | : | 12.000.000 | APBD |
| 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu | : | 6.950.000 | APBD |
| 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | : | 153.854.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 23.000.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Pengadaan Mebeleur | : | 7.000.000 | APBD |
| 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | : | 16.000.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 123.902.800 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | : | 5.000.000 | APBD |
| 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | : | 52.765.000 | APBD |
| 3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | : | 66.137.800 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 144.222.600 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | : | 120.750.000 | APBD |
| 2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | : | 10.200.000 | APBD |
| 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | : | 13.272.600 | APBD |

| | | | |
|--|---|----------------------|------|
| 2 Rehabilitasi Sosial | : | 1.305.563.500 | |
| Kegiatan | | | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | : | 199.095.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | : | 169.095.000 | APBD |
| 2 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | : | 30.000.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | : | 1.106.468.500 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | : | 158.936.000 | APBD |
| 2 Penyediaan Permakanan | : | 208.688.000 | |
| 3 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | : | 308.334.500 | APBD |
| 4 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | : | 430.510.000 | APBD |
| 3 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | : | 129.440.000 | |
| Kegiatan | | | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | : | 129.440.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan Makanan | : | 129.440.000 | APBD |
| 4 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | : | 92.941.800 | |
| Kegiatan | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota | : | 92.941.800 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota | : | 92.941.800 | APBD |
| Jumlah Anggaran | : | 4.610.224.900 | |



 BUPATI LAMPUNG BARAT,



 NUKMAN

Liva, 29 JANUARI 2024

 KEPALA DINAS SOSIAL

 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



 JAMIN S.P.

 Pembina Muda IV c

 NIP. 196508141985031002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS SOSIAL

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAIMIN, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nukman
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 29 Oktober 2024

Pj. Bupati Lampung Barat
Pihak Kedua,

Drs. NUKMAN, M.M

Pihak Pertama,

PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2024

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET |
|-----|--------------------------------|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | | |
| 1 | Meningkatnya PMKS yang Berdaya | Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya | (Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) | 87.82% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota | 3.188.224.826 | |
| Kegiatan | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.495.000 | |
| Sub Kegiatan | | |
| 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | APBD |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.385.000 | APBD |
| 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.775.000 | APBD |
| 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.430.000 | APBD |
| 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.445.000 | APBD |
| 6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3.460.000 | APBD |
| 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | APBD |
| Kegiatan | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.612.753.926 | |
| Sub Kegiatan | | |
| 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.604.798.926 | APBD |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | APBD |

| | | | |
|--|---|-------------|------|
| 3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / | : | 2.455.000 | APBD |
| 4 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | : | 2.500.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 10.275.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | : | 10.275.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 13.161.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | : | 13.161.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Admisnitrasi Umum perangkat Daerah | | 224.414.500 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | : | 6.730.500 | APBD |
| 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | : | 1.500.000 | APBD |
| 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | : | 30.405.000 | APBD |
| 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | : | 12.000.000 | APBD |
| 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu | : | 6.950.000 | APBD |
| 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | : | 166.829.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 23.000.000 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Pengadaan Mebeleur | : | 7.000.000 | APBD |
| 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | : | 16.000.000 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 123.902.800 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | : | 5.000.000 | APBD |
| 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | : | 52.765.000 | APBD |
| 3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | : | 66.137.800 | APBD |
| Kegiatan | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 144.222.600 | |
| Sub Kegiatan | | | |
| 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | : | 120.750.000 | APBD |
| 2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | : | 10.200.000 | APBD |

| | | | | |
|----------|--|---|----------------------|------|
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | : | 13.272.600 | APBD |
| 2 | Rehabilitasi Sosial | : | 1.358.126.500 | |
| | Kegiatan | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | : | 251.658.000 | |
| | Sub Kegiatan | | | |
| | 1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | : | 221.658.000 | APBD |
| | 2 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | : | 30.000.000 | APBD |
| | Kegiatan | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | : | 1.106.468.500 | |
| | Sub Kegiatan | | | |
| | 1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | : | 158.936.000 | APBD |
| | 2 Penyediaan Permakanan | : | 208.688.000 | |
| | 3 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | : | 308.334.500 | APBD |
| | 4 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | : | 430.510.000 | APBD |
| 3 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | : | 164.845.000 | |
| | Kegiatan | | | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | : | 164.845.000 | |
| | Sub Kegiatan | | | |
| | 1 Penyediaan Makanan | : | 164.845.000 | APBD |
| 4 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | : | 113.941.800 | |
| | Kegiatan | | | |
| | Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota | : | 113.941.800 | |
| | Sub Kegiatan | | | |
| | 1 Pemeliharaan Taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | : | 113.941.800 | APBD |
| | Jumlah Anggaran | : | 4.825.138.126 | |



Liwa, 29 Oktober 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024 DINAS SOSIAL

A. Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan

Monev Bantuan di Pekon
Kagungan Kecamatan Sukau



Monev Bantuan di Pekon
Pampangan Kecamatan Sekincau



Monev Bantuan di Pekon Gunung
Raya Kecamatan Sukau



Monev Bantuan di Pekon
Sekincau Kecamatan Sekincau



**B. Assemen Kemensos RI
(Pendampingan Anak korban
kekerasan dan Bantuan
Disabilitas, lansia, LKS)**

Pendampingan Anak korban
kekerasan Seksual (Way Petay Kec
Sumber Jaya)



Pendampingan Anak korban
kekerasan Seksual (Pekon Suka
Makmur, Kec. Belalau)



Pendampingan korban kekerasan
Seksual (Kel Way Mengaku Kec Balik
Bukit)



Pendampingan Anak korban
kekerasan Seksual (Pekon Way Petay
Kec Sumber Jaya)

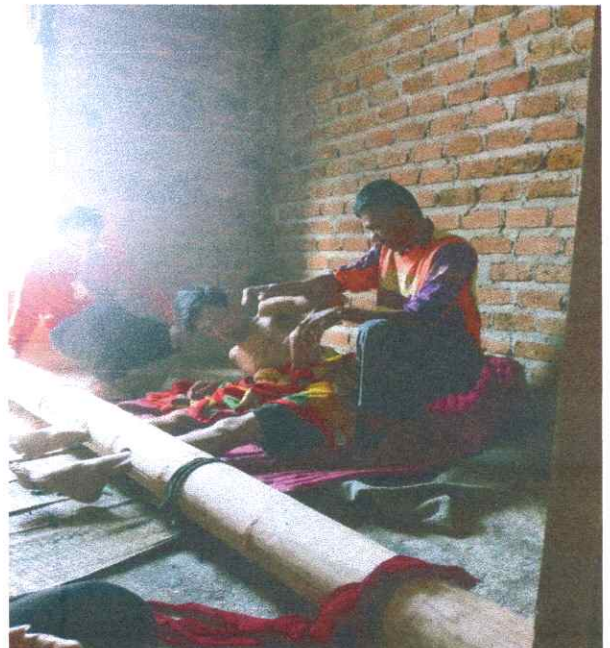


C. PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL, DAN SOSIAL (ODGJ)

Assesmen ODGJ Di Hara Kuning
Kecamatan Sukau



Assesmen ODGJ di Pekon Tanjung
Raya Kecamatan Sukau



Evakuasi ODGJ di Kel. Pasar
Liwa Kecamatan Balik Bukit



Assesmen ODGJ di Pekon Tapak Siring
Kecamatan Sukau



D. Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Pemutahiran Data PBI)



E. Penyediaan Permakanan (Sembako Lansia)

Kecamatan Balik Bukit



Kecamatan Batu Brak



Kecamatan Batu Ketulis



Kecamatan Air Hitam



F. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Tagana)



**G. Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan Napza**

1. Pendamping BPNT

Pos Kecamatan Balik Bukit



2. Pendataan PMKS



3. Hibah

Kegiatan PEPABRI



Kegiatan KARANG TARUNA



**H. PEMBERIAN AKSES
LAYANAN PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN DASAR
(PKH)**



**I. Penyediaan Perumahan
Buffer stock bencana dan
bantuan bencana**

Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya
(Kebakaran)



Pekon Sidoarjo, Kecamatan Suoh
(Konflik Gajah)



Semarang Jaya, Kecamatan Air
Hitam (Kebakaran)



Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan
BNS (Konflik Harimau)



J. Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan

